

# Kegagalan Sistem Rekrutmen Partai Politik: Studi Kasus Biro PSI Jakarta Tahun 2020 - 2021

Ridoh Binsar<sup>1)</sup>, Kadek Dwita Apriani<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [ribinsar@gmail.com](mailto:ribinsar@gmail.com)<sup>1)</sup>, [kadek88@gmail.com](mailto:kadek88@gmail.com)<sup>2)</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Partai Solidaritas Indonesia is the fourth largest party in DKI Jakarta Province based on the results of the 2019 simultaneous general elections. PSI Jakarta established the Bureau on October 12, 2020. This study aims to analyze the location of the failure of the recruitment system and the location of the position of the Jakarta PSI Bureau using a qualitative research approach. Moving away from the recruitment model scheme of the political parties created by Pippa Norris as a scalpel to peeling more sharply into the findings focused on the passive performance of the bureau. Factors that influence the passive performance of the Bureau include: (1) The seriousness of the JAKARTA DPW PSI in directing the Bureau's management; (2) Lack of commitment for bureau administrators in carrying out performance; (3) There are no performance support facilities for the Bureau; (4) There is no old administrator of the Bureau as a mentor because this Bureau is indeed newly formed; (5) Recruitment by focusing on expertise. The recruitment selection stage of the Jakarta PSI Bureau in general, consists of administrative filing selection and interview selection. The bureau is a test material from Jakarta to attract people who have certain skills and can take the time.*

**Keywords:** Bureau, PSI Jakarta, Failure, Recruitment System, Passive Performance

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penulis melaksanakan penelitian ini dalam upaya untuk mengulas secara rinci mengenai faktor penyebab yang mengindikasikan kegagalan PSI Jakarta dalam menerapkan sistem rekrutmen partai politik selama dan setelah proses penerimaan Biro PSI Jakarta pada tahun 2020 hingga 2021. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta dari

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai objek penelitian. PSI secara sah berdiri pada 16 November 2014. Grace Natalie merupakan ketua umum PSI ketika masa awal peresmiannya. Saat ini PSI Jakarta tengah berada pada fase memerintah dan tetap terus melakukan proses rekrutmen politik. Dalam proses rekrutmen kader baru, PSI Jakarta kerap kali menggunakan kanal media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai sarana untuk penyebaran informasi proses

rekrutmen. PSI Jakarta menilai bahwa penyebaran informasi proses rekrutmen menjadi lebih efektif dalam menarik simpati masyarakat dari kalangan anak muda. Hal ini tidak terlepas dari sebagian besar generasi muda yang sangat gemar menggunakan media sosial. Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi PSI Jakarta. Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia dan seluruh partai politik di Indonesia merupakan sebuah amanah dalam kultur negara demokrasi. Amanah tersebut berkembang seiring dengan menguatnya anggapan bahwa rakyat menjadi faktor wajib untuk dilibatkan dalam segala bentuk proses politik. Pada proses penerapannya, partai politik dapat memperluas jejaring dari tingkat provinsi hingga tingkat ranting (kelurahan atau desa). Pada proses memperluas jejaringnya, partai politik harus mematuhi payung hukum yang ada dan peraturan internal partai. Rasa patuh tersebut sebagai modal untuk memperluas jejaring konsituen baru dan anggota baru sebuah partai politik. Berdasarkan hasil pemilihan umum di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan beragam hasil survei mengenai elektabilitas PSI menjadi partai pilihan generasi milenial menjadikan hal tersebut sebagai peluang bagi PSI Jakarta untuk hadir dengan menawarkan sesuatu hal yang berbeda. Terdapat sepuluh posisi Biro PSI Jakarta yang ditawarkan kepada publik sejak tahun 2020, yaitu: 1. Biro Aksi Sosial; 2. Biro Pelatihan dan Pengembangan SDM; 3. Biro Ekonomi Kerakyatan; 4. Biro Advokasi Kelompok Khusus; 5. Biro Hukum dan

Penelitian Perundangan; 6. Biro Pengawasan dan Evaluasi; 7. Biro Penggalangan Pemilih Pemula; 8. Biro Digital, Data, dan Media Massa; 9. Biro Lingkungan Hidup dan Perkotaan 10. Biro Kerjasama Eksternal. Saat pembukaan perdana rekrutmen Biro PSI Jakarta tahun 2020, terdapat 24 orang terpilih di dalamnya.

Adanya rekrutmen Biro PSI Jakarta ini menjadikan seluruh pengurus Biro diberikan kedudukan dan fungsi dasar yang jelas dalam struktural pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta. Akan tetapi, sejak awal proses rekrutmen Biro pada tahun 2020 dan proses rekrutmen kedua pada 2021, tidak ada kejelasan kedudukan Biro dalam struktural pengurus DPW.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem rekrutmen dan kedudukan Biro PSI Jakarta?
2. Mengapa rangkaian proses penerimaan Biro menjadi bentuk Kegagalan dalam menerapkan sistem rekrutmen di PSI Jakarta?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memaparkan mengenai alur sistem rekrutmen Biro PSI Jakarta dan menjelaskan mengenai penyebab dan akibat yang mengindikasikan kegagalan penerapan sistem rekrutmen Biro PSI Jakarta

### **2. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam menganalisa kegagalan sistem rekrutmen partai politik: studi kasus Biro PSI Jakarta tahun 2020 – 2021, penulis mengkaji penelitian - penelitian terkait sebelumnya, yakni pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Nesyandri Sidauruk, pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan.” Pada proses penerapan rekrutmen kader baru DPC PDI-P Kota Medan, dilaksanakan sesuai dengan aturan partai dan melalui beragam cara lain, seperti: pendekatan persuasif, ajakan, dan mengadakan sosialisasi perihal eksistensi partai pada media massa. Rasa tanggungjawab dalam proses pelaksanaan rekrutmen politik menjadi sebuah keharusan bagi seluruh pengurus partai. Rangkaian proses rekrutmen politik ini dirancang untuk menyiapkan SDM yang unggul, meski DPC PDIP Kota Medan tidak mengoptimalkan seluruh rangkaian tersebut. Tinjauan pustaka yang kedua adalah berupa jurnal yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi, pada tahun 2014 dengan judul “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.” Publikasi ini bertujuan untuk menjelaskan partai yang berperan penting dalam mengembangkan calon pemimpin daerah. Sepanjang pelaksanaannya, partai cenderung tampil buruk. Citra buruk tersebut tercermin dari proses pencalonan kandidat elitis, sistem rekrutmen yang buruk karena terdapat dugaan syarat rekrutmen dengan “mahar,” dan masih maraknya politik kekerabatan ditingkat lokal. Tinjauan Pustaka yang ketiga adalah jurnal ilmiah karya Muhammad Sopian; Bismar Arianto, pada tahun 2017 yang berjudul “Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).” Jurnal ini membahas mengenai pengaruh kecenderungan partisan yang masih tinggi mendominasi dalam proses

menetapkan calon legislatif PDI-P Kota Tanjungpinang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berlakunya sistem skoring dalam memilih kader internal melalui kualifikasi, seperti: pemahaman sejarah perjuangan partai, posisi struktural dalam partai, sepak terjang keikutsertaan pelatihan dan keaktifan kader. Tinjauan pustaka keempat adalah skripsi karya Rudi Saputra, pada tahun 2018 dengan judul “Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda).” Kajian pustaka ini mengulas mengenai Pola rekrutmen PSI terhadap anak muda. Dalam penelitiannya, Rudi Saputra, menemukan data bahwa rangkaian proses rekrutmen yang diterapkan oleh PSI mempunyai kualifikasi khusus tertentu bagi peserta seleksi calon pengurus partai. Bagi kader PSI yang mengikuti proses rekrutmen, tidak terikat dengan kualifikasi khusus tersebut. Kualifikasi khusus yang diterapkan PSI dalam merekrut calon pengurus dengan mempertimbangkan faktor batasan usia. Calon pengurus PSI harus berusia di bawah 45 tahun karena sudah menjadi peraturan resmi yang ditetapkan DPP PSI. Tinjauan pustaka kelima adalah skripsi dari Zulfadli Rahman Siregar, pada tahun 2020 dengan judul “Partai Politik dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pemuda).” Dalam penelitiannya tersebut mengungkap hasil mengenai strategi dari DPC PKS Pondok Aren dalam proses rekrutmen anak muda menjadi kader. Salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan mengkombinasikan doktrinasi dari nilai – nilai islam dalam kehidupan sosial ekonomi ditengah masyarakat.

Tinjauan pustaka keenam dari Jelly Anggara, pada tahun 2018 dengan “Analisis Rekrutmen Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Internal Partai: Studi Kasus DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.” Pada penelitian beliau tersebut, mencoba mengulas mengenai proses rekrutmen politik pada PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Dalam proses penerapannya sendiri kerap kali menerapkan model rekrutmen “Campuran” dengan tidak hanya menggunakan pola rekrutmen Top-down ataupun Botton-up saja.

### **Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Cara partai memperoleh kekuasaan adalah dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Hal ini untuk menjalankan fungsi partai, partai berkewajiban melakukan tiga hal yang biasa dilakukan oleh partai. Hal ini untuk memilih calon dan setelah calon terpilih, langkah selanjutnya adalah menjalankan kampanye, setelah kampanye berjalan dan calon akan dipilih dalam pemilihan umum berikutnya akan dilakukan oleh partai politik sebagai tugas menjalankan fungsi pemerintahan (legislatif atau eksekutif). Menurut pemikiran Ramlan Surbhakti, akademisi dan mantan Ketua KPU tahun 2004-2007, partai politik terbagi menjadi tujuh bagian dalam menjalankan fungsinya. Pada kategori pertama, partai politik berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik dalam pemikiran Ramlan Surbhakti terbagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Pada kategori kedua, yaitu rekrutmen politik parpol sebagai organisasi publik. Hal ini adalah salah satu fungsi dasar untuk dapat memperluas jaringan dan desentralisasikan partai itu sendiri. Pada Kategori yang ketiga terdapat partisipasi politik yang merupakan kegiatan dari masyarakat umum dalam mengawal proses penentuan arah dan pelaksanaan kebijakan umum serta andil dalam proses penentuan pemimpin pemerintahan Kategori keempat adalah partai politik sebagai wahana untuk mengintegrasikan kepentingan. Kategori yang kelima adalah partai politik sebagai Sarana Komunikasi Politik antara masyarakat dengan pemerintah maupun dalam hal sebaliknya. Pada kategori yang keenam yaitu partai politik sebagai Pengendali Konflik. Kategori yang ketujuh adalah fungsi partai sebagai kontrol politik, dalam hal ini partai harus dapat memiliki tolak ukur berupa nilai-nilai ideologi partai untuk menunjukkan apakah ada penyimpangan atau kesalahan dalam proses penyusunannya. dan hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

### **Sistem Kaderisasi**

Kaderisasi merupakan salah satu bagian penting dari proses rekrutmen politik. Terasa sangat sulit bagi partai politik untuk dapat terus eksis ditengah masyarakat, tanpa adanya sistem kaderisasi yang kuat. Prinsip pertama adalah prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dapat dipahami karena semua anggota partai harus diikuti dalam proses kaderisasi. Artinya, setiap anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan lainnya.

Prinsip kedua adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini diartikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader partai. Akses yang adil dirancang untuk menciptakan ruang yang sama bagi semua anggota untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses ke jalur promosi dan karir politik tanpa diskriminasi terhadap SARA. Prinsip ini dapat menyortir oligarki partai dalam pemilihan calon legislatif, pemilukada dan presiden/wakil presiden, serta pejabat publik lainnya. Prinsip ketiga adalah prinsip layering. Hirarki rangkaian kader partai didasarkan pada hierarki piramida. Penerapan pola ini dapat segera diterapkan dengan mempertimbangkan strata sebagai dampak dari penetapan sistem kaderisasi yang sifatnya piramidal dan strata merupakan dampak dari penetapan karir dalam organisasi yang bersifat piramidal pula.

### **Sistem Rekrutmen Politik**

Proses rekrutmen merupakan salah satu bagian penting bagi partai politik dalam menjalankan sistem. Proses tersebut menjadi penting sebab proses ini menentukan setiap individu yang nantinya akan menjalankan beragam fungsi yang ada dalam sebuah partai. Hal yang ideal adalah ketika partai harus mengikuti beberapa prinsip yang berlaku umum atau berlaku umum dalam proses pencalonan saat melakukan rekrutmen. Setidaknya ada 10 prinsip yang harus menjadi acuan dasar. Prinsip yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas merupakan bentuk kesetiaan kepada partai dan menjadi sifat mendasar bagi politisi dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan garis perjuangan partai.

Prinsip yang kedua adalah bersih. Setiap kader dan pengurus partai politik berkesempatan untuk dapat mewakili masyarakat, baik di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Prinsip ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan merupakan seperangkat prinsip yang harus dipatuhi dalam proses rekrutmen. Prinsip keempat adalah tanggung jawab. Setiap rangkaian penerimaan wajib bermanfaat bagi pengurus partai, calon kader partai, dan masyarakat. Prinsip kelima adalah meritokrasi. Prinsip keenam adalah demokrasi. Demokrasi pada rangkaian proses penerimaan kerap dijadikan acuan untuk memperluas jaringan partisipan ketika para penyeleksi mengikuti perubahan model seleksi calon yang jauh lebih inklusif dari model sebelumnya. Prinsip ketujuh adalah desentralisasi. Atas dasar penetapan calon, kader-kader tingkat pusat dan daerah di semua tingkatan memilih calon secara proporsional. Prinsip kedelapan adalah pendanaan yang memadai. Dalam setiap proses pemilihan kader, partai harus fokus pada kemampuan calon anggota memberikan dukungan dana. Prinsip kesembilan adalah humanisme. Nilai pada prinsip ini berfokus pada akses terbuka bagi semua, tanpa memandang status sosial ekonomi. Prinsip kesepuluh adalah non-partisanship. Fokus dari non-partisan ini berlaku khusus untuk penyeleksi.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini berupa metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki karakteristik untuk mengeksplorasi menggunakan lingkungan sebagai sumber data.

Penelitian kualitatif bersifat fleksibel sangat membantu penulis dalam berupaya menjalankan penelitian lebih dalam tanpa ada rasa takut karena mendapat tekanan dari pihak external. Pendekatan penelitian yang eksplanatif ini penulis gunakan untuk menemukan sejauh apa kegagalan penerapan sistem rekrutmen bagi PSI Jakarta dalam proses rekrutmen biro.

### **Sumber Data**

Sumber data sebagai penjelasan proses dan asal data yang diperoleh, lalu kemudian diolah serta dianalisis menggunakan teori sistem rekrutmen partai politik oleh Pippa Norris. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan dua sumber data, yaitu: data primer dan data pendukung untuk menunjang penelitian. Data primer adalah perkataan dan tingkah laku dari mereka yang ditunjuk sebagai informan.

### **Penentuan Informan**

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah beragam tokoh yang penulis yakini memiliki sumber daya atau terlibat langsung dalam penelitian. Informan di dalam penelitian ini juga memiliki beberapa macam yang terbagi atas beberapa fungsi dan wewenang di dalamnya yaitu: *Informan Kunci*: Informan kunci ialah tokoh yang memahami ekosistem rekrutmen dalam tubuh PSI Jakarta, tokoh tersebut adalah Ketua DPW PSI Provinsi DKI Jakarta. Informan Utama: Informan Utama ialah tokoh yang ikut serta langsung di dalam sistem rekrutmen politik yang diteliti, dalam hal ini adalah Wakil Ketua I, Direktur Eksekutif PSI Jakarta, Wakil Ketua Fraksi PSI Jakarta merangkap Koordinator Biro Kerjasama Eksternal, dan

Asisten eksekutif DPW PSI Jakarta.

Informan Tambahan: Informan tambahan ialah tokoh yang dipercaya akan menyampaikan informasi pendukung walaupun tidak ikut serta langsung dalam interaksi yang diteliti, tokoh yang dimaksud adalah Pengamat politik sekaligus Overseas Research Assistant National University of Singapore (NUS), Anggota DPRD Fraksi PSI Dapil 5 Jakarta Timur, Anggota Biro DDMM, dan Anggota Biro Aksi Sosial.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan penulisan penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan teknik dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan perekaman atau dokumentasi. Teknik menghimpun data pertama yang peneliti gunakan selama proses penelitian ialah observasi. Pengamatan (observasi) merupakan proses dimana seorang peneliti ikut serta dalam observasi lapangan dengan tujuan mempelajari tentang ciri-ciri dan kondisi subjek yang diteliti. Berangkat melalui proses observasi ini lah peneliti akan dapat benar-benar mengenali karakter dan situasi lapangan dalam proses memperoleh data yang akurat. Teknik dalam menghimpun data yang kedua ialah dengan wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini tidak terstruktur, dan wawancara dilakukan mengikuti petunjuk pedoman wawancara, tetapi sebebaskan satu orang berbicara dengan orang lain secara ringan dan terbuka. Penelitian ini menggunakan data-data pelengkap di dalam prosesnya, langkah ini diambil melalui metode dokumentasi.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DPW PSI Jakarta**

Berdasarkan pada kepemilikan delapan kursi DPRD, PSI Jakarta sekarang berada di dalam pemerintahan. Inilah saatnya visi, idealisme, dan komitmen memberantas korupsi serta melawan intoleransi semakin ditingkatkan menjadi aksi nyata perjuangan dan kebijakan. PSI Jakarta hadir di DPRD dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif. Sebelumnya, hampir tidak ada yang tahu apa kerja anggota DPRD di Jakarta, bahkan tidak peduli.

PSI Jakarta juga ingin menunjukkan bahwa peran legislatif sangat penting dalam menentukan masa depan Jakarta, melalui fungsi mengesahkan anggaran ratusan triliun, menyusun peraturan daerah, dan mengawasi kinerja Gubernur dan jajarannya. Sekarang, warga Jakarta mulai merasa memiliki wakil rakyat di Kebon Sirih (Gedung Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta).

### **Konstruksi Pengurus DPW PSI Jakarta**

Susunan dimulai dari jabatan Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar. Berikutnya terdapat Wakil Ketua I, Mi'raj Yusuf; bersama dengan Wakil Ketua II, Muhammad Fathony. Susunan dibawahnya terdapat Sekretaris, Elva Farhi Qolbina; bersama dengan Wakil Sekretaris, Allya Natasya Aurora. Susunan berikutnya adalah Bendahara, Andrew Darmawan; bersama dengan Wakil Bendahara, Dina Triana.

### **Konstruksi Pengurus Biro PSI Jakarta Tahun 2020 - 2022**

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat dan menantang bagi Jakarta. Melalui anjuran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, PSI Jakarta selalu memastikan seluruh anggota DPRD dan jajaran kepengurusan kami terus bekerja maksimal di tengah pandemi Covid-19. PSI Jakarta memotong gaji staf dan anggota DPRD, menyumbangkan gaji kami untuk warga terdampak, membantu penyaluran bansos baik dari pemerintah maupun swasta, hingga mendorong perbaikan kebijakan-kebijakan publik terkait penanganan krisis kesehatan dan ekonomi. Fraksi PSI Jakarta mengawal kesiapan fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan alat pelindung diri, hingga memperjuangkan keringanan pajak bagi pelaku usaha dan UMKM.

PSI Jakarta giat dalam mengadvokasi bantuan bagi siswa terancam putus sekolah, jaminan penghidupan bagi pekerja, bahkan pencairan hak-hak aparatur sipil negara yang terus bekerja menjalankan roda pemerintahan Ibukota. PSI Jakarta tetap konsisten berkomitmen dalam slogan #HadirUntukRakyat. Selain prioritas utama penanganan Covid-19, memasuki tahun 2020 silam, PSI Jakarta juga telah menetapkan "Konsolidasi Internal" sebagai tema besar organisasi. Di tengah pandemi, PSI Jakarta juga tetap fokus merapikan struktur kepengurusan hingga tingkat kelurahan, membangun budaya kerja disiplin, komunikatif, dan bersinergi hingga akar rumput. PSI Jakarta juga telah membentuk beragam Biro pendukung organisasi, menetapkan berbagai SOP organisasi, menjadikan PSI mesin politik yang semakin tangguh, efektif, dan bertanggung jawab di dalam percaturan politik Ibukota.

dari tiga puluh delapan (38) nama hanya terdapat dua belas (12) pengurus lama yang melanjutkan kembali pengabdianya di kepengurusan baru tahun 2021. Suatu hal yang menarik adalah bahwa dengan sedikitnya pengurus lama Biro yang melanjutkan kepengurusan di tahun 2021 ini membuktikan perkataan dari Bapak Michael Victor Sianipar bahwasanya evaluasi dari setiap pengurus DPW PSI Jakarta dilakukan secara rutin demi menjaga dan meningkatkan kinerja DPW dan Fraksi.

Pembina Biro PSI Jakarta pada saat awal terbentuk di tahun 2020 hingga di kepengurusan tahun 2021 adalah Bapak Mi'raj Yusuf (Bro Faris). Bapak Mi'raj Yusuf sendiri juga dipercaya oleh Ketua DPW PSI Jakarta menjadi Wakil Ketua I. Namun, seiring dengan semakin besarnya tuntutan partai yang sedang bersiap untuk menghadapi Pemilu 2024 ini, konsistensi berkomitmen menjadi sebuah kunci. Hal tersebut guna membentuk proses rekrutmen yang baik sehingga dapat mencetak pengurus Biro yang lebih berkomitmen dalam menjalankan kinerja.

Besarnya tuntutan partai dan banyaknya anggota Biro yang semakin pasif di periode kepengurusan tahun 2020 hingga 2021, membuat Pak Mi'raj Yusuf harus digantikan posisinya oleh Pak Idris Ahmad (Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta periode tahun 2019 – 2021) sebagai Wakil Ketua I dan Pembina Biro. Penggantian ini tentunya telah melalui berbagai tahap evaluasi dan dengan pertimbangan yang besar demi meningkatkan kinerja dari Biro itu sendiri. Penggantian ini juga diharapkan akan

membawa angin segar bagi Biro PSI Jakarta untuk semakin lebih aktif lagi dalam menjalankan kinerja demi membantu tugas pokok dari DPW dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Pada tahun 2022, PSI Jakarta kembali membuka rekrutmen pengurus Biro. Perbedaan signifikan antara daftar pengurus Biro tahun 2021 dengan tahun 2022, dapat dilihat seksama dari sudah ditetapkannya koordinator dari setiap masing – masing Biro. Pengadaan koordinator bagi setiap Biro difungsikan sebagai jembatan antar anggota.

### **Proses Rekrutmen Biro PSI Jakarta Tahun 2020 – 2021**

Proses penerimaan pengurus partai politik merupakan salah satu kewajiban dan tidak terlepas dari unsur – unsur penting partai seperti unsur pendidikan politik, korespondensi politik, penjelasan dan pengumpulan kepentingan, serta kemampuan sebagai sarana penghubung antara masyarakat dengan pejabat eksekutif. Bisa disebut bahwa partisipasi politik adalah kemampuan esensial partai yang tidak hanya menetapkan kualitas anggota legislatif dan para otoritas publik yang diciptakan oleh partai melalui Pemilu, tetapi juga berdampak pada sifat demokrasi itu sendiri. Cukup signifikannya proses rekrutmen partai politik sehingga kemampuan partai yang lainnya menjadi kurang memberi makna dengan asumsi bahwa partai tersebut gagal dalam menerapkan sistem rekrutmen yang baik. Pada rangkaian proses rekrutmen perdana Biro, sebanyak seratus tiga puluh empat (134) orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta.



Melalui dua (2) rangkaian proses rekrutmen, diantaranya: seleksi berkas administrasi dan seleksi wawancara. Berdasarkan hasil akhir seleksi wawancara, didapatkan sebanyak dua puluh empat (24) orang yang terpilih menjadi pengurus Biro DPW. Proses rekrutmen Biro PSI Jakarta pada tahun 2020.

Langkah berikutnya setelah mengikuti seluruh proses rangkaian rekrutmen, seluruh pengurus Biro terpilih akan dihubungi via e-mail, kemudian akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan Biro tahun 2020 dan langsung ditempatkan ke dalam sepuluh (10) formasi Biro yang tersedia. Pengadaan Biro dalam tubuh PSI Jakarta ini sendiri merupakan hasil buah pemikiran dari Ketua PSI Jakarta. Pada tahun 2021 silam, DPW PSI Jakarta kembali membuka rekrutmen pengurus Biro. Pada tahun tersebut, pembukaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021. Pada pembukaan pendaftaran calon pengurus Biro PSI Jakarta tahun 2021 ini memiliki penambahan satu tahap proses seleksi. Tahapan proses seleksi yang ditambahkan adalah proses seleksi melalui tahap forum group discussion (FGD) atau diskusi kelompok. Penambahan seleksi diskusi kelompok ini bertujuan untuk mengetahui potensi secara lebih mendalam bagi calon pengurus Biro mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Biro yang dipilih. Proses seleksi Biro sejak tahun 2020 – hingga tahun 2021 relatif sama tahapannya, namun yang membedakan hanya adanya penambahan proses seleksi dalam bentuk diskusi kelompok. Tahapan pertama proses rekrutmen Biro adalah tahap seleksi administrasi dari data diri yang pendaftar isi melalui google form.

Terdapat perbedaan antara google form tahun 2021 dengan 2022 yang terletak pada diwajibkannya untuk melampirkan video perkenalan diri pada google form tahun 2022 sedangkan untuk tahun google form tahun 2021 tidak terdapat hal tersebut.

Penulis tidak dapat menampilkan dokumen google form tahun 2020 – 2021, karena berdasarkan keterangan dari asissten eksekutif DPW PSI Jakarta yang penulis himpun, dikatakan bahwa dokumen google form tahun 2020 – 2021 tersebut sama dengan yang digunakan pada tahun 2022, tentunya dengan penambahan melampirkan video perkenalan diri tersebut. Tahap berikutnya setelah menerima hasil pernyataan lulus seleksi pemberkasan, maka calon pengurus Biro harus kembali menunggu undangan jadwal untuk seleksi diskusi kelompok yang akan dikirim melalui surel. Tahap berikutnya setelah menerima hasil pernyataan lulus seleksi pemberkasan, maka calon pengurus Biro harus kembali menunggu undangan jadwal untuk seleksi diskusi kelompok yang akan dikirim melalui surel. Setelah selesai seleksi diskusi kelompok, seluruh calon pengurus Biro yang lulus seleksi ke tahap seleksi terakhir, akan diberitakan hasilnya melalui surel. Bagi peserta calon pengurus Biro yang lulus ke tahap terakhir, maka akan dihubungi melalui whatsapp oleh asisten eksekutif DPW PSI Jakarta. Tahapan rekrutmen pengurus Biro PSI Jakarta yang terakhir adalah seleksi wawancara. Peserta calon pengurus Biro PSI Jakarta tahun 2021 yang lulus ke tahap wawancara dapat menyesuaikan agenda keseharian yang kosong dengan jadwal

wawancara yang tertera dan mengisinya sesuai jadwal yang masih tersedia.

Sesudah dinyatakan lulus seleksi wawancara, maka calon pengurus Biro terpilih akan diundang ke dalam whatsapp group oleh tim asisten eksekutif DPW. Langkah berikutnya adalah menunggu surat keputusan pengangkatan Biro PSI Jakarta yang langsung ditandatangani oleh Ketua DPW. Setelah surat keputusan tahun 2020 atau tahun 2021 atau bahkan tahun 2022 diterbitkan, maka seluruh pengurus Biro yang dinyatakan lulus semua tahap seleksi di tahun – tahun tersebut, secara resmi telah menjadi bagian dari keanggotaan PSI Jakarta dan resmi menjadi pengurus Biro PSI Jakarta.

### **Analisis Teori Sistem Rekrutmen Partai Politik Pippa Norris Terhadap Proses Rekrutmen Biro PSI Jakarta Tahun 2020 – 2021**

Penulis membagi menjadi tiga (3) jenis proses, diantaranya: Proses pengenalan, proses seleksi, dan proses penetapan. Seluruh tahapan dalam tabel 4.3 tersebut merupakan hasil temuan yang penulis dapatkan ketika seluruh proses rekrutmen Biro PSI Jakarta dan dikorelasikan dengan tiga (3) skema model rekrutmen ciptaan Pippa Norris. Proses yang pertama adalah proses pengenalan. Proses pengenalan sendiri merupakan proses untuk memperkenalkan Biro PSI Jakarta kepada masyarakat. Proses memperkenalkan Biro kepada masyarakat ini termasuk juga dalam proses untuk memberitakan informasi penerimaan rekrutmen Biro yang

dilakukan melalui akun media sosial resmi PSI Jakarta, yaitu: Instagram dan Facebook. Pemberitaan informasi rekrutmen ini juga memuat informasi mengenai kualifikasi apa saja (?) yang diperlukan oleh PSI Jakarta bagi masyarakat yang berminat mendaftar menjadi peserta rekrutmen Biro. Proses berikutnya adalah proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari beberapa pengurus inti DPW, Direktur Eksekutif, dan asisten eksekutif. Proses seleksi pada tahun 2021 mencakup 3 tahap seleksi, meliputi: seleksi administrasi berkas, seleksi diskusi kelompok, dan seleksi wawancara. Seluruh proses seleksi ini harus berlandaskan pada AD/ART partai dan setelah proses seleksi berlangsung, maka seluruh calon pengurus Biro terpilih, wajib menandatangani kontrak komitmen sebagai kader dan pengurus partai. Proses yang terakhir adalah proses penetapan. Pada proses penetapan ini, seluruh peserta terpilih akan dikukuhkan secara resmi menjadi kader dan pengurus partai melalui surat keputusan pengangkatan pengurus Biro yang ditandatangani langsung oleh Ketua PSI Jakarta. Seluruh pengurus Biro yang sudah dikukuhkan secara resmi tersebut, akan mendapatkan kartu tanda anggota partai sebagai simbol administrasi resmi sebagai kader dan pengurus partai.

### **Pasifnya Kinerja Biro PSI Jakarta Sebagai Refleksi Kegagalan Penerapan Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi**

Rekrutmen Biro yang dijalankan oleh PSI Jakarta tentunya sudah melalui tahap perencanaan yang cukup matang

dengan diadakannya rapat koordinator DPW bersama Fraksi PSI DPRD Jakarta. Rapat koordinator ini rutin diadakan pada hari kamis di setiap minggunya. Pada sekitar dua (2) bulan pertama setelah selesai seluruh proses rekrutmen Biro tahun 2021, Biro PSI Jakarta juga cukup rutin mengikuti rapat koordinator via daring. Hal tersebut justru berbanding terbalik ketika memasuki bulan ke tiga (3), di mana sudah tidak ada lagi ajakan melalui whatsapp group pengurus Biro untuk mengikuti rapat koordinasi. Tidak konsistennya pelibatan Biro PSI Jakarta dalam rapat koordinasi mingguan sesuai keterangan dari Bapak Gilang Surya Wartani tersebut adalah salah satu contoh masalah kecil yang menjadi awal pemantik dari pasifnya Biro dalam bekerja. Hal tersebut dapat dimaklumi oleh seluruh pengurus Biro dengan alasan bahwa tema rapat koordinator yang sedang dibawakan bersifat terbatas tanpa perlu dibahas bersama Biro.

Sesuai topik subbab ini yang penulis fungsikan untuk mengupas mengenai pasifnya kinerja Biro, penulis juga sudah mewawancarai seluruh informan utama hingga informan kunci. Tindakan wawancara ini, penulis lakukan untuk dapat menjawab pertanyaan, apakah seluruh informan kunci maupun informan utama setuju dengan pasifnya kinerja Biro PSI Jakarta dapat dikatakan sebagai bentuk dari kegagalan penerapan sistem rekrutmen dan sistem kaderisasi? Pertanyaan tersebut sangat menohok dan penulis sendiri memang sengaja menguji mental keberanian dari penulis sendiri untuk menanyakan hal tersebut agar penelitian ini segera langsung

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua. Biro PSI Jakarta sebagai talent pool yang diisi oleh orang – orang volunteer, tentunya mempunyai masalah mendasar mengenai komitmen waktu dalam yang berakibat pada pasifnya kinerja dari Biro itu sendiri. bahwa pasifnya kinerja Biro ini disebabkan karena sistem rekrutmen yang digunakan oleh DPW PSI Jakarta yang menitikberatkan pada keahlian. Pasifnya kinerja Biro ini juga berakibat pada tidak fungsi Biro yang tidak efektif dan membuktikan bahwa Biro ini kurang terarah dalam bekerja. Kedua hal tersebut tentu dampak dari di lingkungan PSI Jakarta, baik itu anggota Biro maupun koordinator Biro, semuanya masih sama – sama belajar untuk saling melengkapi satu sama lain.

### **Kritik Pengamat Politik Atas Sistem Rekrutmen Biro PSI Jakarta**

Pada Subbab ini, penulis mencoba untuk menuangkan ide – ide kritis dari salah satu tokoh pengamat politik akar rumput di DKI Jakarta. Pengamat politik yang penulis undang untuk menjadi informan pelengkap dalam penelitian kali ini adalah Bapak Satriono Priyo Utomo. Bapak Satrio, sebagaimana panggilan akrab nama beliau, saat ini menjadi Asisten Peneliti Luar Negeri untuk National University of Singapore dalam program politik perang dingin. Bapak Satrio juga berprofesi menjadi dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Bapak Satrio menilai bahwa kinerja PSI Jakarta dalam sebuah partai dan dari sudut pandang warga Jakarta Utara, tepatnya di

kecamatan Sunter, Bapak Satrio secara pribadi tidak mendapatkan kerja-kerja politik secara real time dalam artian tidak mendapatkan kerja-kerja life service secara langsung dari aktivitas PSI sendiri. Bapak Satrio beranggapan bahwa kemunculan PSI ini memiliki spirit untuk membangun konsep demokrasi modern yang mau tidak mau atau suka- tidak suka memang harus berkompromi dengan situasi liberal kita atau situasi Liberalisme Politik kita. Konsekuensi dari hal tersebut adalah memang tidak banyak selama ini orang – orang yang mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam tahapan neoliberalisme atau kapitalisme dengan konsekuensi demokrasi juga demokrasi yang harus berkompromi dengan kapitalisme. Bapak Satrio juga mengatakan bahwa sebetulnya dengan kemunculan PSI yang berbasiskan kampanye terhadap pendekatan politik milenial melalui platform sosial media, kampanye bergaining positions, packaging partai yang membuat citra PSI dalam hal mobilisasi yang lebih dominan melalui sosial media. Bapak Satrio beranggapan bahwa hanya PSI yang masih terus masih menggunakan pola rekrutmen berbasis Google form, menyerupai pendaftaran TOEFL dan rekrutmen karyawan-karyawan driver online. Hal tersebut satu sisi sangat menarik tetapi di sisi lain apakah orang-orang yang mendaftar ke dalam biro PSI Jakarta itu betul-betul merasakan representasi dari PSI? PSI sudah sangat cukup baik dalam memahami konteks di dalam kondisi sistem ekonomi liberal, "one people one smartphone" bahkan bisa lebih.

Bapak Satrio beranggapan bahwa jika dalam koridor konteks Jakarta dan sosiologi masyarakat Jakarta, penggunaan teori rekrutmen partai politik ciptaan Pippa Norris itu sangat relevan. Hal itu didasari karena kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan mengenai basis pendidikan. Siapa yang dapat memastikan kualitas dari tahapan-tahapan tersebut? Siapa yang dapat memastikan tahapan administrasinya dan tahapan seleksinya sampai tahapan evaluasi dari hasil seleksi tersebut? Tahapan-tahapan yang terkandung dalam teori Pippa Norris itu bukan barang baru dalam proses rekrutmen. Catatan pentingnya adalah teori tidak pernah bertanggung jawab atas proses rekrutmen yang terjadi dalam sebuah partai.

Ketika PSI Jakarta melakukan rekrutmen terbuka di masa pandemi Covid-19, maka proses rekrutmen dan pola rekrutmen yang diterapkan oleh PSI Jakarta tidak terlalu efisien dan tidak berjalan efektif dalam konteks psikologis masyarakat Jakarta. Melihat usia PSI yang masih muda seperti sekarang ini, Bapak Satrio melihat terdapat empat tipologi rekrutmen yang diciptakan oleh Barbara Geddes. Letak dari partisan dalam PSI Jakarta bukan terkandung dalam kadernya dan bukan terkandung dalam loyalitas kader PSI terhadap partai. Efek dari tokoh publik seperti musisi dan Jurnalis menumbuhkan energi loyalitas dari generasi muda terhadap politik. Representasi kritisisme yang dilihat oleh generasi muda milenial adalah tokoh jurnalis (Grace Natalie) yang ada dalam tubuh PSI.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai hasil penulisan penelitian dan analisis, bab kelima ini penulis tunjukkan untuk memaparkan kesimpulan secara umum dan untuk menjawab segala pertanyaan dalam penelitian kali ini. Lebih dalam lagi pada bab ini juga penulis berusaha untuk memaparkan mengenai saran atau rekomendasi dari penulis mengenai kegagalan sistem rekrutmen partai politik, studi kasus: Biro PSI Jakarta Tahun 2020 - 2021. Biro PSI Jakarta merupakan bahan eksperimental yang dibuat oleh DPW PSI Jakarta sehingga tidak dapat disetarakan kedudukannya sederajat dengan pengurus inti DPW. Biro PSI Jakarta baru terbentuk pada tanggal, 12 Oktober 2020. Biro merupakan tenaga pembantu kinerja bagi DPW PSI Jakarta dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI. Hal tersebut membuktikan bahwa benar adanya ketidakaktifan atau pasifnya biro PSI Jakarta periode 2020 - 2021. Sistem rekrutmen yang berfokus pada keahlian menjadi salah satu penyebab kegagalan sistem rekrutmen yang diterapkan oleh PSI Jakarta dalam hal penerimaan biro pada tahun 2020 - 2021. Fenomena kegagalan penerapan sistem rekrutmen dalam kasus penerimaan Biro PSI Jakarta ini, harus menjadi bahan evaluasi utama bagi DPW PSI Jakarta untuk membenahi diri supaya lebih serius lagi dalam menciptakan ekosistem rekrutmen dan kaderisasi di seluruh tingkatan rekrutmen.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budiarjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Geddes, B. (1994). *The Political Uses of Bureaucracy: Presidential Survival versus Administrative Competence*. Dalam B. Geddes, *Politician's dilemma: building state capacity in Latin America* (hal. 143,144). University of California Press.

Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., . . . Budiatri, A. P. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI).

Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2006). *Handbook of Party Politics*. California: SAGE Publications Inc.

Lay, C. (2006). *Involusi Politik Esai-esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Norris, P. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications Ltd.

Norris, P. (1995). *Reforming Recruitment*. Dalam P. Norris, & J. Lovenduski, *Political Recruitment (Gender, Race and Class in the British Parliament)* (hal. 237-238). Cambridge University Press.

Rush, M. &. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Suyanto, B., & Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

### **Jurnal**

Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik LIPI Volume 11 No. 2 Desember 2014*.

Sopian, M., & Arianto, B. (2017). "Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) . *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agustus 2017*.

### **Skripsi atau Tesis (daring):**

Anggara, J. (2018). *Analisis Rekrutmen Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Internal Partai : Studi Kasus DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Areza, T. S. (2020). *Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia*. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Saputra, R. (2018). *Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Siregar, Z. R. (2020). *Partai Politik dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pemuda)*. Jakarta: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

### **Internet:**

Gabrillin, A. (2016, Oktober 7). *Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di Kemenkumham*. From [kompas.com](http://kompas.com):

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/07/17203081/partai.solidaritas.indonesia.lolos.seleksi.badan.hukum.di.kemenkumham>

KPU Kota Blitar. (2018, Januari 31). *Sebanyak 16 Partai Dilakukan Verifikasi Sesuai PKPU No. 6 Tahun 2018*. From [kpu.blitarkota.go.id](http://kpu.blitarkota.go.id):

<http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/sebanyak-16-partai-di-lakukan-verifikasi-sesuai-pkpu-no-6-tahun-2018>

Yuniarto, T. (2022, Maret 1). *Partai Solidaritas Indonesia*. Diambil kembali dari

[kompaspedia.kompas.id](http://kompaspedia.kompas.id):

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/partai-solidaritas-indonesia-psi>

Nina. (2021, Maret 12). *Meritokrasi The Right Person on The Right Job*. Diambil kembali dari [rumahkompetensiindonesia.com](http://rumahkompetensiindonesia.com):

<http://rumahkompetensiindonesia.com/wp-content/uploads/2021/03/NinaKD-Meritokrasi-DISCO-12032021.pdf>

